

# EKOLOGI POLITIK MASYARAKAT PESISIR (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-ekonomi dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)

-241-

❖ A. Syatori, M.Si.

## A. PENDAHULUAN

Secara geografis, masyarakat pesisir atau nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Secara sosiologis, mereka memiliki karakteristik sosial yang berbeda dengan masyarakat lainnya, karena perbedaan karakteristik sumberdaya yang dimiliki. Kesejahteraan secara ekonomi masyarakat pesisir sangat bergantung pada sumberdaya perikanan baik perikanan tangkap di laut maupun budidaya, yang hingga saat ini aksesnya masih bersifat terbuka (open access), sehingga kondisi lingkungan wilayah pesisir dan laut menentukan keberlanjutan kondisi sosial ekonomi mereka.

Membicarakan masyarakat nelayan hampir pasti isu yang selalu muncul adalah masyarakat yang marjinal, miskin dan menjadi sasaran eksploitasi penguasa baik secara ekonomi maupun politik. Kemiskinan yang selalu menjadi trade mark bagi nelayan dalam beberapa hal dapat dibenarkan dengan beberapa fakta seperti kondisi pemukiman yang kumuh, tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah, rentannya mereka terhadap perubahan-perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang melanda, dan ketidakberdayaan mereka terhadap intervensi pemodal, dan penguasa yang datang. Disamping itu, kemiskinan mereka juga diakibatkan oleh masalah kerusakan ekosistem pesisir-laut yang berdampak serius terhadap menipisnya sumberdaya perikanan.

Masalah lain yang tak kalah penting dalam kegiatan ekonomi nelayan, terutama terkait operasional penangkapan ikan adalah persoalan modal usaha untuk menyediakan segala kebutuhan kegiatan penangkapan ikan, seperti bahan bakar kapal, alat-alat penangkap ikan dan sebagainya. Bagi masyarakat nelayan, khususnya nelayan kecil atau nelayan tradisional, kebutuhan akan modal usaha, yang bisa diakses atau yang bisa didayagunakan setiap saat tersebut, sangat

tinggi. Kondisi ini merupakan respon atas besarnya biaya investasi di sektor perikanan tangkap, sedangkan perolehan pendapatan tidak pasti dan tingkat penghasilan bervariasi. Dengan kebutuhan konsumsi rumah tangga yang harus dipenuhi setiap hari, nelayan tidak memiliki tabungan dana yang mencukupi jika suatu saat harus berhadapan dengan kenyataan bahwa sarana-prasarana penangkapan yang mereka gunakan mengalami kerusakan dan membutuhkan biaya perbaikan yang cukup besar. Keterbatasan pemilikan dana kontan inilah yang kemudian mendorong nelayan terperangkap dalam jaringan hutang piutang yang kompleks, khususnya kepada para rentenir atau penyedia kredit informal.

Selain masalah sosial-ekonomi, kondisi lingkungan wilayah pesisir dan sistem mata pencaharian nelayan juga berdampak pada persoalan pendidikan dan sosial-keagamaan, terutama pendidikan keagamaan masyarakatnya. Sistem mata pencaharian masyarakat nelayan yang mengharuskan mereka berada di tengah laut untuk jangka waktu yang cukup lama, memaksa mereka untuk meninggalkan aktifitas lain selain 'melaut', termasuk aktifitas pendidikan dan sosial keagamaan. Para nelayan biasanya mengajak anak-anak mereka untuk melaut, padahal anak-anak mereka termasuk anak usia sekolah. Akibatnya, tentu saja, hak pendidikan mereka tidak terpenuhi secara maksimal. Bahkan hanya untuk memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, program pemerintah. Inilah salah satu argumentasi yang mendasari mengapa pendidikan masyarakat nelayan rendah. Begitupun dalam melakukan aktifitas keagamaan, mereka memiliki kesempatan yang sangat terbatas. Imbasnya, pengalaman keagamaan dan pendidikan keagamaan mereka menjadi kurang memadai.

Kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan sangat tergantung pada kondisi fisik lingkungan pesisir. Karenanya, pengkajian tentang bagaimana ekologi politik masyarakat nelayan menjadi sangat relevan dan urgen untuk dilakukan sebagai titik pijak untuk mengetahui bagaimana dinamika kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat. Dalam kaitan inilah kiranya studi ini mendapatkan titik relevansi dan signifikansinya.

Berdasarkan paparan di atas, kajian ini berupaya menjawab dua pertanyaan, pertama, bagaimanakah ekologi politik masyarakat nelayan desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Dan kedua, apakah urgensi ekologi politik tersebut bagi kehidupan sosial-

ekonomi dan keagamaan masyarakat desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Dua pertanyaan ini menemukan urgensinya bahwa hampir seluruh persoalan kehidupan nelayan bertumpu pada persoalan ekologi pesisir, maka studi tentang ekologi politik masyarakat nelayan ini menjadi sangat relevan dan signifikan untuk dilakukan. Tidak saja untuk menganalisis lebih mendalam bagaimana dinamika ekologi politik tersebut, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana urgensi, signifikansi dan pengaruh ekologi politik tersebut bagi kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan. Maksud dan tujuan studi inilah yang menjadi relevansi dan signifikansi studi ini dilakukan.

## **B. METODOLOGI**

Studi tentang kehidupan dan proses sosial-ekonomi masyarakat sangat tepat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipandang lebih tepat dalam karena berkaitan dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis mengenai ekologi politik dan urgensinya bagi kehidupan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat nelayan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui secara mendalam masing-masing informan mengenai berbagai persoalan yang terkait dengan tema penelitian yang tersusun dalam panduan wawancara. Sebagai uji kedalaman data dari wawancara mendalam, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data juga dilakukan dengan metode pengamatan atau observasi. Proses pengamatan dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui lebih dekat dan mendalam tentang apa yang sedang diamati sekaligus *cross-check* atas data hasil wawancara mendalam. Selain itu, sebagai penunjang, pengumpulan data juga dilakukan melalui penelusuran dokumen dan studi literatur. Data yang diperoleh melalui kedua metode ini berfungsi untuk memperkuat data hasil wawancara dan pengamatan. Jenis kedua data ini biasanya dalam bentuk teks tertulis seperti buku, jurnal, majalah, pamflet, artikel, makalah, berita surat kabar dan sebagainya.

Kajian ini mengambil site di desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Suatu kawasan pesisir yang pada beberapa tahun yang lalu, di kawasan itu, telah dikembangkan mega-proyek

pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Alasan mendasar dari pemilihan lokasi penelitian ini adalah hasrat untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam dampak dari pembangunan PLTU itu terhadap kondisi lingkungan pesisir yang menjadi tumpuan penghidupan masyarakat Citemu, yang berimbas pada perubahan sosial-ekonomi dan keagamaan masyarakat.

Sementara itu, dalam proses analisa data dilakukan melalui dua tahap, coding dan analisis. Pada tahap pertama, data yang masih mentah dan 'berserakan' akan diklasifikasi dan distrukturkan berdasarkan subtema. Setelah itu, proses analisis data. Secara umum, proses analisa data dilakukan dengan menggunakan metode reflexive analysis, yakni teknik analisa data yang berpusat pada kekuatan refleksi peneliti sebagai instrumen penelitian. Metode ini bekerja melalui proses dialektis antara data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah diklasifikasi dengan daya refleksi peneliti yang berpijak pada kerangka teori yang telah dirumuskan. Ini adalah proses interpretasi data, membunyikan data, karena data 'tidak berbicara untuk dirinya', tetapi mereka harus diinterpretasi dan dianalisis<sup>1</sup>

### C. EKOLOGI POLITIK MASYARAKAT PESISIR

Secara teoritik, kajian ini meminjam tiga konsep terkait, yaitu ekologi politik, masyarakat pesisir dan kebijakan ekologis masyarakat pesisir. Terma ekologi merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara manusia dan lingkungannya. Sebagai bidang ilmu pengetahuan, ekologi bertujuan untuk memberikan ilustrasi hubungan antara manusia dan spesies lainnya. Perubahan lingkungan juga dilihat sebagai hasil hubungan antara manusia dan spesies lainnya.<sup>2</sup> Sedangkan ekologi politik mengacu pada upaya pengkombinasian perhatian pada ekologi dan ekonomi politik secara luas yang mencakup dialektika antara masyarakat dan sumber daya, serta dialektika kelas dan kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Ekologi politik merupakan *the social and political conditions surrounding the causes, experiences, and management of environmental problem.*<sup>3</sup>

---

1 Rossman, Gretchen, B. and Sharon F. Rallis, *Learning in the Field*, London: SAGE Publications, Ltd., 2003), hlm. 36. .

2 Forsyth, T, *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*, London: Routledge, 2003).

3 Forsyth, T, 2003, *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*,

Dengan semangat konseptual tersebut, ekologi politik mengambil psisi, *pertama*: sebagai perhatiannya kepada 'skala', yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi dan menganalisa rantai yang menghubungkan dinamika lingkungan dengan kekuatan-kekuatan sosial, politik, budaya dan ekonomi pada berbagai situs konseptual dan fisik, dan *kedua*: fokusnya yang konsekuen pada 'kuasa' dalam berbagai perwujudannya sebagai kunci pusat untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebar. <sup>4</sup>

Asumsi pokok dalam ekologi-politik bermuara pada pendirian bahwa perubahan lingkungan tidaklah bersifat netral, tetapi merupakan suatu bentuk *politized environment* yang banyak melibatkan aktor-aktor yang berkepentingan baik pada tingkat lokal, regional, maupun global. <sup>5</sup> (Bryant, 2001). Aktor yang dominan umumnya adalah negara dan swasta besar. Dominasi ini menyebabkan apa yang disebut *tragedy of enclosure*, yakni tragedi akibat dominasi negara dan swasta yang menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan makin dibatasi. Melemahnya akses ini membuat masyarakat makin marginal. Tujuan dari ekologi-politik tidaklah hanya sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan semata, tetapi juga merupakan pijakan penting dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

Konsep kedua yaitu tentang masyarakat pesisir. Istilah masyarakat pesisir secara umum dipahami sebagai masyarakat dengan mata pencaharian utama nelayan. Ini bisa dimaklumi karena nelayan menjadi mata pencaharian utama kelompok masyarakat yang hidup di sekitar pantai ini. Menurut Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, masyarakat pesisir atau nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. <sup>6</sup> Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Masyarakat nelayan memiliki sifat unik yang berkaitan dengan usaha

---

(London: Routledge, 2003).

- 4 Neumann, R.P., 2005, *Making Political Ecology*, London: Hodder Arnold, 2005; Robbins, P., *Political Ecology: A Critical Introduction*, (Malden, MA: Blackwell., 2004).
- 5 Bryant, L. Raymon, and Sinead Bailey, 2000, *Third World Political Ecology*, (London and New York: Routledge, 2000).
- 6 Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

perikanan tersebut. Hal ini dikarenakan usaha perikanan sangat bergantung pada musim, harga dan pasar, maka sebagian besar karakteristik nelayan tergantung pada faktor-faktor berikut: *pertama*, Ketergantungan pada kondisi lingkungan. Salah satu sifat usaha yang ada di wilayah pesisir (seperti perikanan tangkap dan budidaya) yang sangat menonjol adalah bahwa keberlanjutan atau keberhasilan usaha tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan khususnya perairan dan sangat rentan pada kerusakan khususnya pencemaran atau degradasi kualitas lingkungan. Kedua, Ketergantungan pada musim. Ketergantungan pada musim ini akan semakin besar khususnya pada nelayan kecil. Pada musim penangkapan nelayan sangat sibuk, sementara pada musim paceklik nelayan mencari kegiatan ekonomi lain atau menganggur. Dan *ketiga*, Ketergantungan pada pasar. Karakteristik usaha nelayan adalah tergantung pada pasar. Hal ini disebabkan komoditas yang dihasilkan harus segera dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau membusuk sebelum laku dijual. Karakteristik ini mempunyai implikasi yang sangat penting yaitu masyarakat nelayan sangat peka terhadap fluktuasi harga. Perubahan harga sekecil apapun sangat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat nelayan.<sup>7</sup>

Karakteristik masyarakat pesisir dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya, aspek pengetahuan, kepercayaan (teologis), dan posisi sosial nelayan. Dilihat dari aspek pengetahuan, masyarakat pesisir mendapat pengetahuan dari warisan nenek moyangnya, misalnya untuk melihat kalender dan penunjuk arah, mereka menggunakan rasi bintang. Keterampilan sebagai nelayan bersifat sederhana dan hampir sepenuhnya dipelajari secara turun temurun. Apabila satu keluarga nelayan mampu untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak, maka harapan agar generasi berikutnya tidak menjadi nelayan sangat besar. Namun, umumnya nelayan tidak mampu membebaskan diri dari profesi nelayan, dilain pihak, banyak ditemui kelompok-kelompok nelayan tetap mampu bertahan hidup dalam menghadapi keadaan yang sangat berat sekalipun, terutama pada masa-masa paceklik.<sup>8</sup>

---

7 Kusumastanto T., *Sistem Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah disampaikan dalam Diseminasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Jawa Barat, Bandung, 2000.

8 Sastrawidjaja dan Manadiyanto, 2002, *Nelayan Nusantara*, (Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Badan Riset

Sementara, dilihat dari aspek kepercayaan, masyarakat pesisir masih menganggap bahwa laut memiliki kekuatan magic sehingga mereka masih sering melakukan adat pesta laut atau sedekah laut. Namun, dewasa ini sudah ada dari sebagian penduduk yang tidak percaya terhadap adat-adat seperti pesta laut tersebut. Mereka melakukan ritual tersebut hanya untuk formalitas semata. Begitu juga dengan posisi sosial nelayan, pada umumnya nelayan tergolong kasta rendah.

Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran. Kondisi ini yang selalu mengakibatkan nelayan tidak pernah untung, keterbatasan infrastruktur menjadikan nelayan merugi, tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut, dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh pihak tengkulak. Di sisi lain rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup, upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap, agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan, seperti rumput laut, memperluas kesempatan kerja sektor *off fishing* dan melakukan transmigrasi nelayan pada wilayah lain yang masih memiliki potensi kelautan.

Dari sudut kebijakan, banyak program telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan hidup nelayan. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).

Namun, secara umum program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam

---

Kelautan dan Perikanan, 2002).

menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat *top down*. Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Oleh karena itu, perlu sekali diterbitkan sebuah kebijakan sosial yang berisikan keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sebagaimana yang mereka butuhkan, kebijakan tersebut juga harus didukung oleh kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten atau kota dimana terdapat masyarakat miskin khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan keegoan dari masing-masing pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah sebagai berikut : *pertama*, keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di-internal pemerintah, yang perlu digaris bawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan, melainkan seluruh pihak terkait.

*Kedua*, keterpaduan keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian, tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan. *Ketiga*, keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial. *Keempat*, keterpaduan lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan (lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Berbagai kebijakan yang dilakukan belum mampu mengangkat kerangkeng kemiskinan para nelayan. Kebijakan pembangunan kelautan selama ini, cenderung lebih mengarah kepada kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa



kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, seperti: *pertama*, Aspek ekologi, *overfishing* penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cenderung merusak ekologi laut dan pantai (trawl, bom, potas, pukot harimau, dan sebagainya). Akibat dari ini adalah menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan horisontal (antara sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat sekitar dan antara nelayan dengan pemerintah). *Kedua*, aspek sosial ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar. Dan *ketiga*, aspek sosio kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara periphery terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan.

#### **D. POTRET KEHIDUPAN MASYARAKAT CITEMU: SOSIAL, EKONOMI DAN KEAGAMAAN**

Secara geografis, desa Citemu kecamatan Mundu kabupaten Cirebon terletak di pinggir pantai dengan wilayah yang terbagi menjadi dua bagian, daerah yang terletak di pinggir pantai dengan kisaran luas wilayahnya 80% berada di wilayah pantai dan sisanya, 20% terletak di seberang jalan raya. Melihat kondisi geografis ini dan karakteristik masyarakat desa pada umumnya, dimana mereka selalu memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal sebagai mata pencahariannya, maka mata pencaharian utama masyarakat desa Citemu adalah nelayan.

Dalam melakukan aktifitas 'melaut', nelayan desa Citemu menerapkan dua bentuk mekanisme berlayar, Harian dan Babang. Proses berlayar Harian dilakukan dengan mekanisme berlayar setiap hari pulang pergi dari darat ke laut dan kembali ke darat dengan waktu pemberangkatan mulai pukul 02.00 WIB dini hari hingga pukul 10.00 WIB. Proses berlayar Babang merupakan proses pelayaran ke laut lepas dengan waktu yang relatif lama dengan kisaran waktu antara

empat hingga lima hari. Proses berlayar Harian merupakan proses 'melaut' yang secara umum dilakukan oleh para nelayan. Sedangkan proses berlayar Babang hanya dilakukan oleh nelayan yang memiliki modal yang besar yang disebut dengan Juragan. Dalam melakukan proses ini, Juragan membutuhkan bawahan atau pembantu yang akan membantunya selama proses berlayar tersebut yang disebut dengan nelayan biasa atau Bidak.

Juragan merupakan sebutan bagi nelayan yang memiliki modal besar dengan perahu yang besar dan peralatan berlayar yang lengkap untuk menangkap hasil laut yang lebih banyak dibanding dengan nelayan biasa. Sedangkan Bidak adalah nelayan biasa yang hanya mempunyai perahu kecil atau tidak mempunyai perahu sama sekali dan hanya mempunyai peralatan berlayar yang terbatas. Untuk keperluan aktifitas melaut, ia harus menumpang kepada perahu Juragan dan membayar sewa perahu yang dianggap sebagai pembayaran bahan bakar solar yang digunakan. Besarnya ongkos yang dibayarkan oleh Bidak kepada Juragan tergantung pada banyaknya hasil tangkapan yang didapatkan olehnya.

Dalam tatanan perekonomiannya yang sarat dengan ketergantungan terhadap sumberdaya alam yang ada, tingkat kehidupan sosial masyarakat desa Citemu berbeda dengan desa lain yang memiliki sumberdaya alam yang berbeda. Masyarakat desa Citemu yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan menjadikan profesi tersebut sebagai profesi yang dapat diwariskan turun temurun, sehingga kehidupan sosial yang dijalankan oleh masyarakat selalu mengajarkan anak-anaknya untuk bergulat dengan keadaan alam dengan cara ikut serta melaut sehingga pada akhirnya ia tumbuh dan menjadi nelayan seperti apa yang telah diajarkan oleh orang tuanya. Alih-alih membantu orang tua dan kehidupan ekonomi orang tua, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak mejadi terampas. Mereka lebih senang membantu orang tuanya melaut dari pada meneruskan pendidikan dan bermain layaknya anak-anak pada umumnya. Sehingga jenjang pendidikan mereka sangat minim.

Hal demikian tidak hanya berlaku bagi anak laki-laki, anak perempuan nelayan juga turut merasakan hal yang sama. Proses pemroduksian rajungan menjadi daging adalah salah satu jenis pekerjaan yang padat karya, pasalnya dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan keratif yang terampil dan cekatan memisahkan

antara daging dan cangkang rajungan. Mereka yang menggeluti usaha demikian adalah mayoritas kaum perempuan. Sebagian besar di antara mereka adalah anak yang berusia belia dan remaja. Pekerjaan demikian dilakukan pada saat jam pelajaran di sekolah dimulai sehingga remaja-remaja belia ini meninggalkan bangku sekolahnya demi mendapatkan rupiah dengan dalih membatu orang tuanya. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak dapat menuntaskan jenjang pendidikan mereka.

Strata pendidikan yang rendah menjadikan mereka hanya berkutat pada satu hal, menjadi nelayan, mengolah hasil tangkapan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan nelayan. Kepentingan administrasi kependudukan bagi mereka bukanlah hal yang harus diperhatikan sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bekerja di laut dan menghabiskan hari-hari di tengah laut lepas menjadikan mereka merasa tidak membutuhkannya, sehingga mereka acuh terhadapnya. Sementara kemajuan zaman menuntut untuk melakukan sesuatu yang jauh dari pemahaman sempit mereka. Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi hal yang wajib bagi mereka yang tidak hanya sekedar menjadi tanda identitas bagi mereka, tetapi juga sebagai salah satu prosedur administrasi yang sering dibutuhkan untuk kepentingan sosial dan lainnya.

Minimnya pendidikan juga tidak hanya berimbas pada tingkat perekonomian masyarakat melainkan mengakibatkan pada minimnya pengetahuan serta kesadaran terhadap kondisi mereka sendiri. Hal demikian terlihat pada kebiasaan mereka yang tidak sadar akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka membuang sampah sembarangan serta acuh terhadap kebersihan. Padahal kebersihan lingkungan merekapun salah satu aspek utama bagi kehidupan nelayan yang menggantungkan hidupnya terhadap sumber daya alam.

Menjalani kehidupan sebagai masyarakat pesisir warga desa Citemu kental akan adat yang rutin dilaksanakan pada setiap tahunnya. Diantara adat tersebut adalah upacara adat nadranan, yaitu upacara adat yang dilakukan rutin tiap satu tahun sekali yang difungsikan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan melalui proses pelarungan sesaji berupa kepala kerbau ke tengah laut. Adat tersebut merupakan salah satu kepercayaan masyarakat nelayan yang mengakar yang mana mereka mempercayai bahwa dengan adat tersebut akan mendapatkan keselamatan dan hasil yang melimpah. Sehingga adat tersebut masih terus dijalankan dan dilakukan bagi masyarakat nelayan.

Kepercayaan dan anggapan sakral pada adat nadranan ini menjadikan ketakutan bagi masyarakat desa Citemu untuk tidak menjalankan proses ritual upacara adat nadranan tersebut pasalnya kepercayaan akan kemaslahatan dan keselamatan yang mereka dapatkan adalah melalui upacara adat nadranan tersebut. Upacara adat nadranan tersebut dilakukan setiap satu tahun sekali khususnya pada bulan Juni pada kalender masehi dan menggunakan kepala kerbau sebagai sesaji utama yang wajib di larungkan ketengah lautan. Kepala kerbau dianggap memiliki makna tersendiri bagi masyarakat desa Citemu yang diinginkan oleh dewa laut. Unsur adat yang demikian menjadi kepercayaan mendasar bagi masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat, namun seiring dengan berkembangnya sistem penyebaran ajaran dan kegiatan yang lebih islami oleh beberapa tokoh masyarakat desa Citemu terjadi sedikit perubahan terhadap ritual-ritual yang dilakukan pada upacara adat tersebut. Seperti penerapan upacara dengan cara yang lebih islami dengan diselipkan upacara tahlil sebagai bentuk syukur.

Dalam pengelolaan hasil yang didapatkan dari aktifitas melaut, nelayan menggunakan sistem produksi dan distribusi yang telah berjalan hingga saat ini. Dengan tatanan sistem sebagai berikut: nelayan memproduksi hasil tangkapan berupa rajungan yang kemudian didistribusikan kepada Bakul (tengkulak) dengan harga yang telah ditentukan oleh Bakul. Setelah itu, proses distribusi bergulir pada Bos yaitu tengkulak besar yang akan mendistribusikan hasil tangkapan nelayan kepada agen besar seperti PT atau perusahaan yang mengolahnya dan akhirnya sampai kepada tangan konsumen hingga ekspor ke luar negeri. Berikut skema proses pendistribusian tersebut:

Proses pendistribusian yang telah disebutkan dalam skema tersebut mengandung berbagai sistem yang terkait di dalamnya. Sistem yang terdapat pada proses pendistribusian hasil tangkapan nelayan pada skema terdapat sistem distribusi yang terkait di antaranya adalah mengenai penetapan harga yang ditentukan oleh Bakul, yakni dengan kisaran harga mencapai Rp 40.000,-/kg. Sementara pada sistem distribusi kedua sistem harga yang berlaku adalah berkisar sampai Rp 110.000,-/kg. Sistem penentuan harga ini berada di tangan Bakul sebagai agen utama yang menadah hasil tangkapan nelayan dengan kebijakan yang berbeda antara nelayan yang satu dengan yang lainnya. Sistem kebijakan harga ini berbeda mana kala nelayan memiliki

persangkutan hutang dengan Bakul berupa modal barang maupun modal uang untuk memenuhi kebutuhan modal alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil tangkapan. Sistem harga yang diberlakukan kepada nelayan oleh Bakul apabila nelayan memiliki hutang adalah dengan cara pengurangan harga rajungan dari harga normal yang tidak dianggap sebagai pencicilan atas hutang modal yang ditanggung oleh nelayan.

Pada proses distribusi rajungan skema pertama, sistem harga yang diberlakukan oleh Bakul kepada nelayan yang berhutang adalah berkisar hingga Rp 35.000,-/kg. Sementara pada skema kedua sistem harga yang diberlakukan bagi nelayan yang memiliki hutang kepada Bakul berkisar hingga Rp 105.000,-/kg. Sistem pengurangan harga bagi nelayan yang memiliki hutang tersebut tidak dianggap sebagai angsuran atas hutang nelayan kepada Bakul sehingga jumlah hutang nelayan tetap utuh dan tetap harus membayar dengan jumlah yang telah dipinjam oleh mereka.

Sistem penetapan harga tersebut tidak berlaku bagi para Bakul terhadap Bos. Karena posisi Bakul hanyalah sebagai penyambung tangan antara nelayan dengan Bos, maka sistem harga yang berlaku bagi Bakul kepada bos dapat ditentukan oleh Bakul itu sendiri sehingga Bos tidak memiliki wewenang untuk menentukan harga. Hanya saja proses tawar menawar menjadi hal yang lazim diantara keduanya, namun Bakul selalu mendapatkan hasil yang lebih besar dari pada nelayan yang telah bersusah payah mencari tangkapan di tengah laut lepas. Kebijakan harga dari Bos kepada Bakul akan sama seperti nelayan kepada Bakul, mana kala Bakul memiliki hutang kepada Bos. Mekanisme dan sistem pendistribusian ini berjalan secara ketat sehingga tidak ada celah bagi nelayan untuk berusaha mencari alternatif pemasaran baru yang lebih berpihak kepadanya. Pasalnya pemberlakuan sistem hutang modal menjadikan nelayan terikat erat kepada para Bakul untuk selalu menyetorkan hasil tangkapan kepada Bakul yang bersangkutan.

Dalam sistem perekonomian masyarakat Citemu, keberadaan Bakul atau tengkulak bagai pisau bermata dua, berperan positif dan negatif. Disatu sisi, mereka layaknya dewa penolong bagi nelayan yang sedang mengalami pailit, karena melalui tangan mereka ini nelayan dapat terus melakukan pekerjaan melautnya, dengan bantuan modal yang dipinjamkan. Mereka juga sangat membantu dalam hal

pendistribusian hasil tangkapan. Namun di sisi yang lain bagaikan 'jeruji penjara' yang mengharuskan nelayan mendekam pada suatu keadaan dan tidak bisa berbuat apa-apa, patuh terhadap segala aturan yang harus mereka jalani.

Perkembangan keagamaan di desa Citemu dianggap baru seumur jangung. Masyarakat mulai sadar dengan agama ditandai dengan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga mulai berkurangnya hobi masyarakat dari hiburan ke pengajian. Masyarakat desa Citemu yang mayoritas sebagai masyarakat nelayan dianggap sebagai masyarakat yang gemar dengan hiburan yang dilihat oleh sudut pandang tokoh agama sebagai kegiatan yang tidak bermanfaat. Kebiasaan seperti ini mulai berkurang semenjak di lakukannya usaha pengadaan pengajian yang diawali dengan perdebatan sengit antara tokoh agama dengan seluruh panitia nadranan karena pada dasarnya masyarakat nelayan memiliki adat khas yakni sedekah bumi berupa nadran yang dilakukan rutin setiap tahunnya.

Salah satu tokoh agama melihat bahwa kegiatan nadran adalah hal yang tidak bermanfaat dan dianggap sebagai hal yang sia-sia sehingga ia berusaha untuk menyadarkan masyarakat untuk merubah kebiasaan tersebut. Meskipun pada hakikatnya tokoh agama tersebut merupakan masyarakat lokal desa Citemu yang telah merasakan pahitnya bekerja sebagai seorang nelayan dan pahitnya dunia gelap dalam pergaulan nelayan namun setelah beliau berubah beliau merubah lebih islami. Ia merubah seluruh cara pandangya terhadap adat yang dilakukan oleh masyarakat nelayan. Dari cara pandang yang menganggap bahwa adat tersebut adalah hal yang sia-sia, ia berusaha mengingatkan masyarakat dengan mengikuti rapat tahunan panitia nadran meskipun upayanya gagal untuk merubah hal demikian namun dampak dari adanya perdebatan itu adalah kegiatan pengajian yang rutin dilakukan setiap akhir acara nadranan.

Dana pengadaan pengajian tersebut diambil dari panitia nadranan yang juga merupakan uang masyarakat nelayan yang memiliki perahu yang dikenakan kewajiban untuk membayar iuran sesuai dengan jumlah yang ditentukan untuk berbagai kegiatan nadranan. Salah satu kegiatan nadranan yang dianggap membawa dampak baik adalah kegiatan pengajian yang dilaksanakan dengan tujuan untuk syiar agama Islam di desa Citemu. Bentuk perubahan baik tersebut dirasakan

dengan tanda masyarakat tidak lagi menggemari hiburan dan mulai selektif dalam pendidikan anak-anak mereka.

Berbagai inisiasi usaha yang dilakukan oleh para tokoh agama di desa Citemu bermula dari keprihatinan mereka terhadap kondisi masyarakat desa Citemu yang dianggap tidak mengenal agama dan tidak peduli bahkan tidak ada keinginan untuk mendekat kepada para ulama yang khususnya mengerti tentang agama. Sehingga dari keadaan tersebut mereka mulai membuat sebuah rancangan kegiatan yang di lakukan sesuai dengan basis keilmuan mereka. Ustadz-ustadz yang memiliki kapasitas ilmu keagamaan dari pondok pesantren lebih memilih mengambil jalan mengajar anak-anak untuk mengaji sehingga ada beberapa majlis ta'lim yang berdiri di desa Citemu yang mengajarkan tentang baca tulis Al-Qur'an yang ditujukan kepada anak-anak desa Citemu, yang mana mereka memiliki latar belakang yang berbeda dalam hal pendidikan.

Wajah religius desa Citemu seolah dianggap berubah lebih baik dengan hadirnya beberapa tokoh dari dalam maupun dari luar desa Citemu dan dari berbagai kegiatan keagamaan yang dilakukan di desa Citemu terutama kegiatan DKM yang semakin meningkat dengan kepemimpinan DKM yang baru. Masjid At-Tuqo merupakan masjid yang dibangun oleh seorang kiyai bernama Ikhsan yang merupakan ayah dari pak Mufti yang saat ini menjadi salah satu penasehat di desa Citemu. Kepengurusan DKM masjid desa Citemu selalu diwariskan kepada mereka yang berlatar pendidikan pondok pesantren meskipun mereka bukan penduduk asli desa Citemu. Salah satunya adalah pak Hafidz. Ia adalah pengurus DKM terdahulu yang merupakan menantu dari kiyai Ikhsan. Kepengurusannya hanya berjalan selama satu tahun, karena terjadi konflik antara ia dan pak Mufti perihal pembangunan masjid desa Citemu. Pak hafidz beranggapan bahwa dana pembangunan masjid perlu digunakan untuk membangun tempat wudlu, sedangkan menurut pak Mufti dana tersebut akan lebih tepat jika digunakan untuk pembangunan tempat ibadah dilantai dua masjid desa Citemu. Pak hafidz mengambil tindakan secara sepihak dengan jalan membangun tempat wudlu lengkap dengan kamar mandi yang dibangun dengan kondisi yang layak. Tindakan inilah yang memicu konflik di antara keduanya dan mengakibatkan dicopotnya kepengurusan DKM dari tangan pak Hafidz. Pada masa kepengurusan DKM oleh pak Hafidz ini tak begitu banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan disetiap waktunya. Namun kini degan kepengurusan baru berbagai macam

kegiatan keagamaan muncul ditengah-tengah masyarakat desa Citemu. Kepengurusan DKM tersebut di serahkan kepada Harun yang mana ia juga bukan penduduk asli desa Citemu. Hanya saja, latar pendidikan pondok pesantern yang dimiliki oleh Harun dan kekerabatan Harun dengan kiyai Ikhsan (Harun adalah cucu kyai Ikhsan) lah yang melapangkan jalannya menjadi ketua DKM.

### **E. EKOLOGI POLITIK DALAM RANAH POLITIK DESA**

Desa Citemu sama seperti desa lain pada umumnya, memiliki pemerintahan dan wilayah kekuasaan, memiliki lembaga dan kelembagaan serta sistem pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa pada umumnya. Struktur pemerintahan pada desa Citemu juga masih relatif sama seperti layaknya desa pada umumnya. Hanya saja sistem demokrasi yang dianut oleh masyarakat desa Citemu sedikit berbeda dengan pesta demokrasi pada umumnya. Masyarakat desa Citemu tidak maerasa antusias untuk memeriahkan pesta demokrasi pemilihan kepala desanya sehingga pemilihan tersebut hanya sebatas formalitas.

Dalam struktur lembaga dan kelembagaan desa Citemu memang relatif sama dengan desa pada umumnya, namun perbedaan sistem yang dijalankan oleh pemerintahan desa Citemu dengan desa lainnya jauh berbeda. Seperti proses pengambilan kebijakan yang tidak selalu berpihak kepada masyarakat. Pada sistem pengambilan kebijakannya, pemerintah desa Citemu tidak melibatkan masyarakat untuk turut andil menyumbangkan aspirasinya dalam menentukan kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang tidak dapat dirasakan adil oleh masyarakat. Bantuan pemerintah terhadap masyarakat nelayan yang digunakan untuk kepentingan nelayan menjadi tidak berarti dan tidak bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Pasalnya, realisasi program bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah untuk kelompok nelayan tidak berjalan pada koridor yang sesungguhnya yang menyentuh pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Kesalahan realisasi terhadap dana bantuan ini merupakan bukti di mana lapisan masyarakat bawah tidak mau merangkul dan dirangkul dalam penentuan kebijakan untuk kepentingan bersama. Bagunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu bentuk realisasi bantuan pemerintah yang sama sekali tidak memberikan imbas yang



baik bagi masyarakat nelayan. Sementara itu keberadaan PLTU yang juga turut andil dalam menambah deretan kesulitan nelayan juga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasalnya pemerintah setempat sebagai penyambung lidah masyarakat dengan PLTU tidak mampu memberikan solusi yang terbaik untuk kepentingan kesejahteraan hidup masyarakat nelayan sehingga bantuan yang diberikan oleh PLTU hanya sebatas pada pembangunan gedung sekolah, beasiswa, air bersih, kesehatan yang sama sekali tidak menyentuh pada sisi profesi masyarakat sebagai nelayan.

Dalam struktur pemerintahan desa pada umumnya, pemerintahan desa diberikan dana oleh pemerintah pusat berupa APBD untuk kesejahteraan desa. Dana ini merupakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan desa. Namun pada kenyataannya jumlah dana tersebut tidak pernah terlihat adanya bahkan sampai pada tingkat realisasi untuk kesejahteraan masyarakatpun tidak terlihat keberadaannya. Masyarakat desa Citemu tidak pernah mengetahui berapa jumlah bantuan yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat maupun oleh pihak perusahaan dan PLTU untuk kesejahteraan masyarakat sehingga mereka terkesan acuh terhadap pemerintahan yang ada. Sehingga dana tersebut tidak pernah menyentuh pada sisi kepentingan masyarakat yang mendasar. Realisasi atas bantuan dana yang didapatkan hanya tertuang pada sisi di mana terdapat tokoh pemangku kepentingan yang berpengaruh dalam bidangnya seperti pembangunan gedung, pengajian untuk anak-anak yang dikoordinir oleh pemangku kepentingan tersebut sehingga masyarakat tidak dapat menuangkan aspirasinya.

Dalam sistem pemerintahan terdapat lembaga khusus yang berfungsi untuk mengawasi segala kinerja aparat pemerintah setempat, lembaga tersebut bernama BPD. Namun pada hakikatnya BPD di desa Citemu tidak terlalu menunjukkan kinerjanya sebagai lembaga pengawas pemerintahan setempat. Sehingga tidak ada perubahan terhadap sistem pemerintahan desa Citemu. Padahal pada hakikatnya BPD berfungsi untuk mengontrol setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat. Selain dari pada lembaga pengontrol yang tidak stabil kesadaran kolektif masyarakat akan keadaan demikian terlalu rendah sehingga mereka acuh terhadap kondisi mereka sendiri.

Dalam bidang ekologis, dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan dan kesejahteraan hidup nelayan pada dasarnya telah

banyak program dan kebijakan yang telah gulirkan pemerintah. Program yang bersifat umum antara lain Program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Sedangkan program yang secara khusus ditujukan untuk kelompok sasaran masyarakat nelayan antara lain program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).

Diantara program pemerintah yang hingga kini masih bergulir di desa Citemu adalah Program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT). Program ini merupakan program yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Secara umum, program ini bertujuan untuk menata dan meningkatkan kehidupan desa pesisir/nelayan berbasis masyarakat dan memfasilitasi peran dan fungsi masyarakat sebagai agen pembangunan kelautan dan perikanan. Program ini merupakan bagian pelaksanaan program PNPM Mandiri-KP melalui bantuan pengembangan manusia, sumber daya, infrastruktur/lingkungan, usaha dan siaga bencana dan perubahan iklim.

Dalam praktiknya, model pengembangan PDPT terdiri atas tiga bagian, yaitu: pertama, rencana pengembangan desa pesisir; kedua, penguatan kapasitas kelembagaan; dan ketiga, pencapaian kegiatan sebagai tujuan PDPT. Dengan model ini, muara dari program PDPT adalah terjadinya pengentasan kemiskinan, keberlanjutan kelembagaan masyarakat, kelestarian lingkungan, kemandirian keuangan desa dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan perubahan iklim. Untuk mewujudkan ketagguhan desa diperlukan kebijakan berupa fokus pengembangan kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian persoalan-persoalan pokok yang dihadapi masyarakat desa pesisir. Adapun fokus pengembangan kegiatan yang dimaksud adalah : (1) Bina Manusia; (2) Bina Usaha; (3) Bina Sumber Daya; (4) Bina Lingkungan atau Infrastruktur; (5) Bina Siaga Bencana atau Perubahan Iklim.

Dari sekian banyak program-program tersebut, dalam kenyataannya, secara umum tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu penyebab kurang berhasilnya program-program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan adalah formulasi kebijakan yang bersifat top down.

Formula yang diberikan cenderung seragam padahal masalah yang dihadapi nelayan sangat beragam dan seringkali sangat spesifik lokal. Di samping itu, upaya penanggulangan kemiskinan nelayan seringkali sangat bersifat teknis perikanan, yakni bagaimana upaya meningkatkan produksi hasil tangkapan, sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya jauh lebih kompleks dari itu.

Pada konteks masyarakat Citemu, program-program tersebut, terutama program PDPT, tidak ber[engaruh dan berdampak secara signifikan terhadap kesejahteraan hidup nelayan. Hal ini terutama disebabkan karena dalam pelaksanaannya, nelayan kecil atau nelayan buruh sebagai kelompok mayoritas tidak ditempatkan sebagai kelompok sasaran (target group) utama. Hal ini misalnya bisa dilihat dari implementasi program yang lebih mengutamakan pembangunan sarana dan sarana fisik ketimbang pemenuhan kebutuhan mereka. Disamping itu, program itu dilaksanakan oleh para pelaksana yang sesungguhnya tidak mengerti kebutuhan nelayan sehingga pelaksanaannya tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan nelayan dan perangkat-perangkat sosial mereka. Sehingga nelayan merasa asing dan merasa apatis dengan program itu.

Persoalan terkait kebijakan juga terlihat pada saat pelaksanaan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Citemu. Keberadaan proyek ini tentu saja, semakin memperpuruk nasib nelayan Citemu. Dengan adanya bangunan PLTU yang membentang hingga ke tengah laut bagian Timur membuat nelayan harus menambah jatah solar mereka untuk berlayar hingga ke laut bagian Timur, karena mereka harus memutarai jembatan yang dibuat oleh PLTU yang membentang hingga tengah lautan. Pada dasarnya yang dirasakan nelayan adalah resiko bertambah penghasilan berkurang. Meskipun ada pertanggungjawaban dari PLTU yang memberikan sedikit bantuan untuk nelayan, namun bantuan tersebut tidak pernah menyentuh pada sisi profesi nelayan. Karena PLTU hanya memberikan bantuan kepada nelayan pada sektor darat diantaranya bantuan sembako, kesehatan, pembangunan bak sampah, beasiswa, dan bangunan sekolah. Hal yang berkaitan dengan nelayan hanya pada alat bantu berupa alat penarik perahu yang digunakan nelayan untuk membawa perahunya sampai pada tepi sungai yang terletak di perbatasan desa Citemu dengan desa Bandengan. Meskipun mulanya PLTU menjanjikan program bantuan 2 liter solar untuk nelayan perhari. Namun pada tingkat realisasi

program tersebut menemukan jalan buntu. Nelayan tidak pernah mendapatkan bantuan berupa solar dari PLTU.

Sementara untuk melakukan pemberdayaan masyarakat PLTU sebagai perusahaan juga turut andil dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Pasalanya PLTU juga turut menyumbangkan faktor daftar kesulitan bagi nelayan untuk mendapatkan tangkapan mereka di laut. Bukan hanya pada jarak yang harus ditempuh, isu pencemaran lingkungan akibat limbah yang dihasilkan PLTU juga turut andil dalam permasalahan nelayan. sehingga peran PLTU bagi kehidupan nelayan sangat dibutuhkan. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat peran PLTU diharapkan dapat meningkatkan ketahanan perekonomian nelayan, dengan memberikan solusi terbaik bagi nelayan untuk turut menyemarakkan pengembangan perekonomian nelayan. bukan malah menjejali nelayan dengan angan-angan kosong yang akhirnya menjadikan nelayan terlena dengan berbagai bantuan yang bersifat instan. Segala bentuk bantuan yang telah dilancarkan oleh PLTU sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap nelayan termasuk penyediaan air bersih menjadikan kepribadian dan mental mandiri nelayan terkikis, mereka menjadi asik dengan bantuan yang instan tersebut, sehingga pada akhirnya mereka bergantung pada segala jenis bantuan termasuk terbuka pada masyarakat luar yang datang. Dengan tidak memiliki ketahanan mental yang kuat bagi kepribadian mereka.

“Kami sebagai penyambung lidah antara masyarakat desa Citemu dengan PLTU sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat”. Perangkat desa menamakan dirinya sebagai penyambung lidah antara PLTU dengan masyarakat. Dalam kasus pertanggungjawaban PLTU dalam kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak limbah PLTU secara langsung. Masyarakat desa Citemu adalah bagian dari korban yang paling merasakan dampak keberadaan PLTU di lingkungan kehidupannya. Baik dari segi kesehatan terutama dalam bidang perekonomian. Dahulu, desa Citemu merupakan salah satu daerah penghasil kerang ijo. Sebelum PLTU berdiri di tengah-tengah kehidupan nelayan. sebgain nelayan yang memiliki modal mengembangkan usaha mereka dalam bidang peternakan kerang ijo. Sebagai usaha alternatif kerang ijo termasuk salah satu usaha alternatif yang menjanjikan dapat memenuhi kebutuhan nelayan dalam bidang perekonomian, dengan hasil yang berlimpah dan kualitas bagus. Sehingga tingkat kesejahteraan

masyarakat bukan hanya bertumpu pada aktivitas berlayar ke laut. Kerang ijo merupakan alternatif utama ketika tangkapan nelayan dari laut semakin sedikit. Namun seiring dengan berdirinya PLTU usaha pembudidayaan kerang ijo tidak lagi ditemukan di desa Citemu, pasalnya limbah PLTU merusak ekosistem kerang ijo sehingga tidak dapat berkembang dengan baik dan bahkan berujung pada kegagalan panen. Sementara untuk pengganti kerugian yang diderita oleh nelayan yang mengembangkan usaha dalam bidang pembudidayaan kerang ijo hanya diberikan sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi. Pemberian ganti rugi berupa uang tidak dapat memberikan manfaat apapun bagi kehidupan nelayan. dengan terhapusnya mata pencaharian mereka dalam bidang pengembangbiakkan kerang ijo nelayan kembali lagi menekuni usaha utama mereka yakni berlayar ke laut dan mengais rizki dari laut. Sementara bantuan uang tak dapat memberikan manfaat yang berkepanjangan dan hanya memberikan manfaat dalam jangka yang pendek, sementara itu usaha pengembangbiakkan kerang ijo sudah terhapuskan. Hal ini merupakan salah satu pemutusan roda perekonomian nelayan. sehingga pemerintah sebagai penyambung lidah antara masyarakat dengan PLTU tidak dapat memberikan suara yang terbaik untuk masyarakat desa yang berujung pada pemberian bantuan yang bermanfaat pada skala yang panjang.

Pemberian bantuan PLTU dalam bidang kesehatan, beasiswa, air bersih, gedung pendidikan, pembangunan tempat sampah dan sembako dianggap sebagai langkah yang kooperatif oleh pihak desa. Hal demikian tentu tidak dapat mendukung masyarakat desa Citemu menjadi lebih mandiri untuk mengembangkan kualitas hidup baik dibidang budaya maupun ekonomi. Sehingga pada akhirnya bantuan tersebut memberikan dampak pada pemberian wajah baru bagi masyarakat desa Citemu yang kehilangan kemandirian dan kepercayaan diri untuk bergerak dalam usaha dan karya yang mandiri. Sehingga masyarakat desa Citemu menjadi masyarakat yang terbuka pada masyarakat luar yang datang dan mengharapkan bantuan dari luar yang datang kepada mereka. Sebagai pemangku pemerintahan di desa Citemu, pemerintah desa maupun perangkatnya yang duduk dan menetap menjadi bagian dari masyarakat setidaknya mengetahui perbagai problematika masyarakat, sehingga pada dasarnya pemerintah mengetahui berbagai problem yang dihadapi masyarakat, namun nampaknya proses penyambungan lidah masyarakat ini masih diliputi oleh kebijakan yang bersifat memihak pada satu kepentingan. Sehingga kepentingan

yang bersifat krusial dipandang sebelah mata dan dikesampingkan. Sementara itu anggapan pemerintah yang menyatakan bahwa “yang penting aman dan kondusif”. Adalah sebuah moto yang sangat ciut dalam kalangan pemerintahan. Pasalnya masyarakatnya diharuskan menerima segala kondisi yang ada tanpa harus memberontak untuk menyuarkan hak mereka yang sudah terampas. Sehingga langkah demonstrasi terhadap kebijakan bantuan yang diberikan oleh PLTU dianggap sebagai tindakan yang anarkis yang dapat menghilangkan citra desa Citemu yang cinta damai.

## **F. PENUTUP**

Secara umum, sebagaimana lazimnya masyarakat pesisir, kemiskinan masyarakat nelayan Citemu disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar mereka miskin semakin lemah. Di samping itu, sebab lain yang berpengaruh cukup signifikan atas kemiskinan mereka adalah karena mereka hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu diliputi ketidakpastian (uncertainty) dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (vicious circle) setiap tahunnya.

Dalam kegiatan ekonomi perikanan di desa Citemu, nelayan buruh atau bidak merupakan salah satu komponen sosial yang terpenting. Disamping pemilik perahu atau juragan, bidak merupakan pihak yang paling bertanggungjawab dalam organisasi penangkapan. Hubungan antara juragan dan bidak diikat oleh norma-norma kerjasama. Sebenarnya, dalam konteks sosial ekonomi masyarakat Citemu, hubungan antara bidak dan juragan ini tidak ada masalah yang berarti karena mereka lah ujung tombak kegiatan nelayan. Permasalahan muncul antara merak dengan para tengkulak atau para bakul. Hubungan antara bidak-juragan dengan bakul dibingkai dalam pola patron-klien.

Patron diperankan oleh para bakul dengan kepentingan untuk mendapatkan hasil tangkapan nelayan dengan harga murah dan

memberikan kredit atau pinjaman dengan bunga tinggi. “Biasanya patron memberikan bantuan berupa modal kepada klien. Hal tersebut merupakan taktik bagi patron untuk mengikat klien dengan utangnya sehingga bisnis tetap berjalan” (Satria, 2002). Sedangkan klien diperankan oleh juragan-bidak dengan kepentingan untuk mendapatkan jaminan sosial ekonomi, berupa pinjaman uang disaat situasi sulit, bantuan barang-barang atau keperluan alat tangkap. Hubungan patron-klien ini dinilai kurang baik karena derajat keuntungannya diantara keduanya cukup berbeda, yakni patron lebih banyak memetik keuntungan dibandingkan klien. Tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan : pertama, hubungan diantara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama; kedua, hubungan yang bersifat khusus yang merupakan hubungan pribadi yang mengandung keakraban; dan ketiga, hubungan yang didasarkan atas asas saling menguntungkan. Mekanisme hubungan tersebut seringkali bersifat eksploitatif, dan sengaja dipelihara oleh patron. Diantara sifat eksploitatif tersebut adalah keharusan klien untuk menjual hasil laut kepada patron dengan harga yang ditentukan oleh patron yang bahkan terkadang jauh di bawah harga pasar. Dengan pola hubungan ini, rasanya sulit sekali untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil di Citemu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, W., 1990, *Green Development*, London: Routledge.
- Anwar C, Gunawan H. 2006, *Peranan Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove dalam Mendukung Pembangunan Wilayah Pesisir*. Prosiding Hasil-hasil Penelitian: Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan.
- Bengen DG. 2004, *Menuju Pembangunan Pesisir dan Laut Berkelanjutan berbasis Eko-Sosiosistem*. Jakarta: Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut.
- Bryant, L. Raymon, and Sinead Bailey, 2000, *Third World Political Ecology*, London and New York: Routledge.
- Creswell, John W. 2003, *Research Design, Quantative and Qualitative Approaches*, London: Sage Publication.
- Dahuri R, Rais J, Ginting SP, Sitepu MJ. 1996, *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan secara Terpadu*. Jakarta:

PT. Pradnya Paramitha.

- Forsyth, T, 2003, *Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science*, London: Routledge.
- Kusnadi, 2002, *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Perikanan*, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Akar Kemiskinan Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Strategi Hidup Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- Kusumastanto T, 2000, *Sistem Sosial Ekonomi Budaya Masyarakat Pesisir*. Makalah disampaikan dalam Diseminasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut Jawa Barat, Bandung.
- Marvasti, Amit B., 2004, *Qualitative Research in Sociology*, : SAGE Publications, Ltd.
- Mulyadi, 2007, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Neuman, W. Lawrence, 1991, *Social Research Methods*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- Neumann, R.P., 2005, *Making Political Ecology*, London: Hodder Arnold.
- Robbins, P., 2004, *Political Ecology: A Critical Introduction*, Malden, MA: Blackwell.
- Rossmann, Gretchen, B. and Sharon F. Rallis, 2003, *Learning in the Field*, London: SAGE Publications, Ltd.
- Sastrawidjaja dan Manadiyanto, 2002, *Nelayan Nusantara*. Jakarta: Pusat Riset Pengolahan Produk dan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Badan Riset Kelautan dan Perikanan.
- Satria, Arif, 2009, *Ekologi Politik Nelayan*, Yogyakarta: LKiS.
- Shaw, Ian and Nick Gould, 2001, *Qualitative Social Work Research*, London: SAGE Publications, Ltd.
- Walker, P.A., 2005, *Political Ecology: Where is the Ecology*, *Progress in Human Geography* 29: 73-82.
- Widodo, J. dan Suadi, 2008, *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.